



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PENTINGNYA KOMITMEN KEPEMIMPINAN DI DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DR. SUPRAYOGA HADI

**DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN / WAKIL KETUA PELAKSANA TPPS PUSAT BIDANG ADVOKASI DAN KOMITMEN**

Jakarta, 14 Juni 2022



MILESTONES KEBIJAKAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2013 - 2021



PENTINGNYA KOMITMEN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

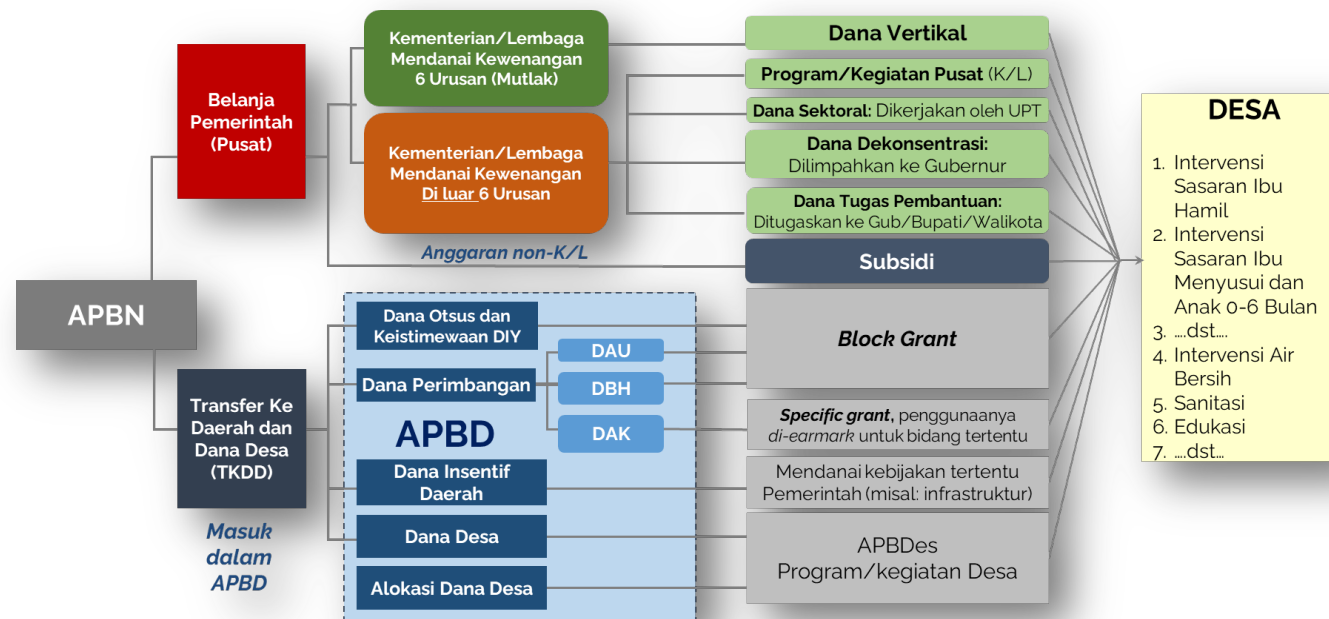
5 Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting

Peningkatan Komitmen & Visi Kepemimpinan di K/L, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota & Pemerintah Desa	Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku & Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik & Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota & Pemerintah Desa	Peningkatan Ketahanan Pangan dan gizi pada Tingkat Individu, Kelyarga dan Masyarakat	Penguatan dan Pengembangan Sistem Data, Informasi, Riset dan Inovasi
---	---	---	--	--

1. Komitmen Politik dan Visi Kepemimpinan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana Perpres 72/2021.
2. Komitmen yang kuat dari para pemimpin dan pelaku di daerah, akan mampu mendorong terjadinya mobilisasi dan optimalisasi sumberdaya yang ada serta memperbaiki koordinasi, cakupan dan kualitas program di lapangan.
3. Saat ini 514 Bupati/Walikota telah menandatangani komitmen bersama untuk melakukan percepatan penurunan stunting di daerahnya.
4. Komitmen ini harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, salah satunya dengan menjamin ketersediaan alokasi anggaran untuk setiap intervensi prioritas yang dibutuhkan.

PENDANAAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Sejak tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan dana untuk percepatan penurunan stunting melalui berbagai mekanisme, baik melalui belanja K/L maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)



Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022:



Anggaran K/L sektoral



Dana Alokasi Khusus (DAK)



Dana Desa terkait stunting



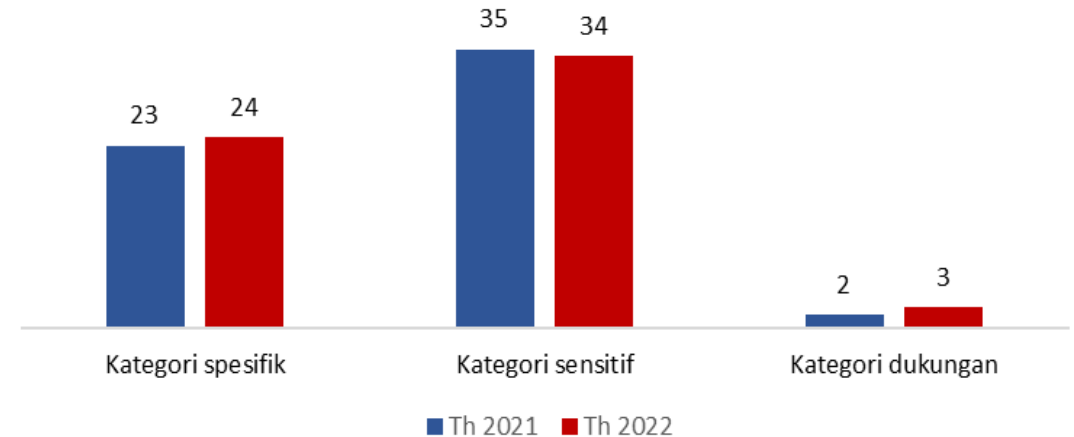
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PENDANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DAERAH

- Salah satu bentuk komitmen Pemda adalah adanya alokasi anggaran dalam APBD untuk intervensi yang diperlukan dalam percepatan penurunan stunting.
- Berdasarkan hasil sementara penandaan dan pelacakan anggaran APBD dari 508 kab/kota (dan 34 provinsi) yang dilakukan bersama Kemenkeu dan Bank Dunia, diketahui bahwa:

- ✓ *Total **alokasi APBD kab/kota** untuk intervensi penurunan stunting diperkirakan* **Rp59,8 T** pada 2021 dan **Rp60,8 T** pada 2022.*
- ✓ *Rata-rata porsi alokasi terkait stunting per kab/kota **baru mencapai 8%** pada Tahun 2021 (8,4%) dan Tahun 2022 (7,8%).*

Alokasi APBD pada SubKegiatan yang Relevan dengan Intervensi Penurunan Stunting (Rp Triliun)



Sumber: Estimasi awal berdasarkan olah data SIKD-Kemenkeu. Menggunakan data 508 kab/kota.

* Berdasarkan anggaran subkegiatan, belum memilah komponen/uraian subkegiatan dan belum melalui pembobotan.

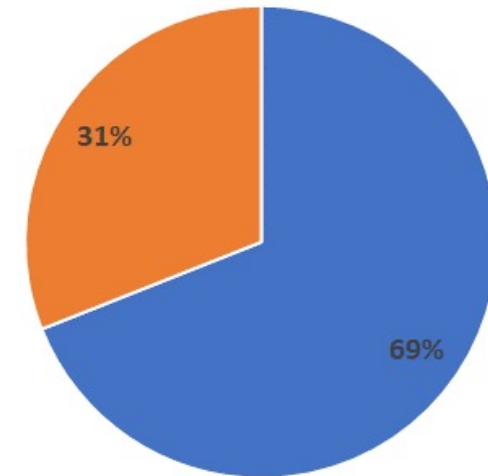


KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TRANSFER KE DAERAH MENDOMINASI PEMBIAYAAN *STUNTING* DALAM APBD

- Berdasarkan hasil sementara penandanaan dan pelacakan anggaran pada APBD juga diketahui bahwa **dari Rp60 triliun alokasi dana terkait stunting dalam APBD:**
 - 69% (Rp 42 trilyun) berasal dari dana transfer ke daerah termasuk DAK.
 - 31% (Rp 18 trilyun) Alokasi non dana transfer
- Proporsi ini diharapkan akan berubah ke depannya, sehingga porsi dana transfer bisa dikurangi, dan **pembiayaan percepatan penurunan stunting yang berasal dari APBD murni** masing-masing daerah dapat ditingkatkan.

Sumber Dana yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting



■ Dana Transfer ke Daerah ■ Tanpa Dana Transfer ke Daerah

Sumber: Estimasi awal berdasarkan olah data [SIKD-Kemenkeu](#).

Menggunakan data transfer ke daerah yang ada/disebutkan dalam sumber dana Subkegiatan terkait stunting



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

CATATAN PENUTUP DAN REKOMENDASI

- ✓ **Komitmen Pimpinan Daerah dalam percepatan penurunan stunting** harus diwujudkan dalam bentuk aksi nyata kegiatan di lapangan, salah satunya melalui pengalokasian anggaran dari APBD untuk intervensi prioritas percepatan penurunan stunting.
- ✓ **Perencanaan dan penganggaran daerah harus berbasis bukti**, baik itu data sekunder hasil analisis situasi (aksi#1 Konvergensi Pencegahan Stunting) maupun data kualitatif lainnya, sehingga renja yang disusun pada aksi#2 dapat menyasar pada permasalahan utama penanganan stunting yang ada di daerahnya, termasuk diantaranya:
 - Penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan di fasilitas kesehatan;
 - Penggunaan KB Modern;
 - Kecukupan konsumsi pangan;
 - Akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) khususnya *parenting class*;
 - Kepemilikan Jaminan Kesehatan.
- ✓ **Rencana kerja yang disusun oleh daerah** harus dapat diidentifikasi sumber pendanaannya, apakah melalui dana transfer dari pusat seperti DAK, apakah melalui APBD muni, atau melalui Dana Desa.
- ✓ **DAK untuk mendukung percepatan penurunan stunting harus dioptimalkan**, untuk mendukung pelaksanaan program di setiap daerah, sehingga **usulan DAK harus disusun dengan baik dan fokus**.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

TERIMA KASIH